

Implementasi Program Menabung Sampah Menjadi Emas di Kota Medan Melalui Bank Sampah Induk New Normal

Giofany Gurusinga^{1*}, Franklin Asido Rossevelt²

^{1,2} Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara, Jalan Dr. T. Mansyur No. 9, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara
grsgio07@gmail.com

Abstract

Waste management has become a significant environmental challenge due to population growth, changing consumption patterns, and the increasing volume of household waste. To address this issue while creating economic value for the community, the Medan City Environmental Agency, in collaboration with Pegadaian and the New Normal Main Waste Bank, implemented the Waste-to-Gold Savings Program. This study aims to analyze the implementation of the program in Medan City. The research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation involving representatives of the Medan City Environmental Agency, Pegadaian, the New Normal Main Waste Bank, and community members. Data were analyzed using George C. Edward III's policy implementation framework, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the program has been implemented fairly well. Communication has been carried out through socialization and educational activities, although public understanding remains uneven. The program is supported by adequate human resources, facilities, infrastructure, and institutional capacity; however, community participation is still relatively low. Implementers demonstrate a positive commitment to the program, although some residents are not yet accustomed to sorting waste and still perceive limited economic benefits. Furthermore, the bureaucratic structure is supported by a clear division of responsibilities and effective coordination among stakeholders. Overall, the Waste-to-Gold Savings Program can be considered fairly successful, although improvements in public outreach and community participation are needed to optimize its implementation and achieve its objectives more effectively.

Keywords: Implementation, Waste Management, Waste-to-Gold Savings Program, Waste Bank, Medan City.

Abstrak

Pengelolaan sampah telah menjadi tantangan lingkungan yang signifikan akibat pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, dan meningkatnya volume sampah rumah tangga. Untuk mengatasi permasalahan tersebut sekaligus menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan bekerja sama dengan Pegadaian dan Bank Sampah Induk New Normal mengimplementasikan Program Menabung Sampah Menjadi Emas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program tersebut di Kota Medan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Pegadaian, Bank Sampah Induk New Normal, serta masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah berjalan cukup baik. Komunikasi telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi, meskipun pemahaman masyarakat masih belum merata. Program ini didukung oleh sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan kapasitas kelembagaan yang memadai, namun partisipasi masyarakat masih relatif rendah. Pelaksana program menunjukkan komitmen yang positif, meskipun sebagian masyarakat belum terbiasa memilah sampah dan masih menganggap manfaat ekonominya terbatas. Selain itu, struktur birokrasi didukung oleh pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, Program Menabung Sampah Menjadi Emas dapat dikatakan cukup berhasil, meskipun peningkatan sosialisasi dan partisipasi masyarakat masih diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan mencapai tujuannya secara lebih efektif.

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan Sampah, Program Menabung Sampah Menjadi Emas, Bank Sampah, Kota Medan.

Copyright (c) 2026 Yoel Y Baunsele, Samel Sopakua, Frengklin Pormes, Anderias Momot, Demisius Momot

✉Corresponding author: Yoel Y Baunsele

Email Address: yoelbaunsele@gmail.com (Jl. Dolog Atas, Halong, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku)

Received 25 September 2026, Accepted 05 Oktober 2026, Published 15 Oktober 2026

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, perkembangan ekonomi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Aktivitas manusia yang terus meningkat menghasilkan volume sampah yang semakin besar setiap tahunnya, baik yang berasal dari rumah tangga, perdagangan, perkantoran, maupun industri. Menurut Marlina (2020), peningkatan timbulan sampah dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan ekonomi, perubahan gaya hidup masyarakat, serta meningkatnya aktivitas konsumsi yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Kondisi tersebut menjadikan pengelolaan sampah sebagai salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penumpukan sampah dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara, serta menjadi sumber penyebaran penyakit dan penyebab terjadinya banjir akibat tersumbatnya saluran drainase. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) sebagai strategi untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Salah satu bentuk implementasi prinsip 3R adalah pengembangan bank sampah berbasis partisipasi masyarakat. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021), bank sampah merupakan sarana pengelolaan sampah yang berfungsi sebagai media edukasi, perubahan perilaku, serta penguatan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan sampah yang memiliki nilai ekonomis. Kehadiran bank sampah tidak hanya bertujuan mengurangi volume sampah, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah sejak dari rumah tangga. Selain memberikan manfaat lingkungan, bank sampah juga mampu memberikan manfaat ekonomi melalui sistem tabungan yang diperoleh dari hasil penjualan sampah yang telah dipilah.

Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar dalam pengelolaan sampah. Tingginya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi menyebabkan volume sampah yang dihasilkan terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kota Medan termasuk daerah dengan timbulan sampah tertinggi di Provinsi Sumatera Utara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat hanya mengandalkan sistem pengangkutan dan pembuangan akhir, tetapi juga memerlukan strategi pengurangan sampah dari sumbernya melalui keterlibatan masyarakat.

Tabel 1. Volume Sampah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

No	Kabupaten /Kota	Sampah Harian (Ton/Hari)	Sampah Tahunan (Ton/Tahun)
1	Kabupaten Tapanuli Tengah	184,65	67.397,25
2	Kabupaten Nias	58,28	21.272,35
3	Kabupaten Langkat	521,44	190.323,78
4	Kabupaten Deli Serdang	1.126,61	411.211,01
5	Kabupaten Asahan	472,78	172.564,99
6	Kabupaten Toba	96,05	35.059,00
7	Kabupaten Humbang Hasundutan	59,33	21.653,73
8	Kota Medan	1.722,60	628.749,22
9	Kota Pematangsiantar	241,43	88.121,44
10	Kabupaten Simalungun	510,81	186.444,74

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2022), diolah peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 1, Kota Medan memiliki timbulan sampah tertinggi dibandingkan sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 1.722,60 ton per hari atau sekitar 628.749,22 ton per tahun. Tingginya volume sampah tersebut menunjukkan bahwa Kota Medan menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Kondisi ini menuntut adanya strategi pengelolaan yang tidak hanya berfokus pada pengangkutan dan pembuangan akhir, tetapi juga pada upaya pengurangan sampah sejak dari sumbernya melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Program Menabung Sampah Menjadi Emas menjadi salah satu inovasi yang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari sampah yang dihasilkan.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan bekerja sama dengan PT Pegadaian dan Bank Sampah Induk New Normal melaksanakan Program Menabung Sampah Menjadi Emas. Program ini merupakan inovasi pengelolaan sampah yang mengintegrasikan aspek lingkungan dengan manfaat ekonomi. Masyarakat didorong untuk memilah sampah yang memiliki nilai jual, seperti plastik, kertas, kardus, dan logam, kemudian menyetorkannya ke bank sampah untuk dikonversikan menjadi saldo tabungan emas. Menurut PT Pegadaian (2023), program ini bertujuan membangun budaya pengelolaan sampah sekaligus meningkatkan literasi investasi masyarakat melalui tabungan emas. Dengan demikian, sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, tetapi juga sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.

Program Menabung Sampah Menjadi Emas juga dapat dipahami sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2017), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi, termasuk persoalan lingkungan. Melalui program ini, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pemilahan dan pengelolaan sampah sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran lingkungan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi. Partisipasi masyarakat menjadi faktor

penting karena keberhasilan pengelolaan sampah berbasis komunitas sangat bergantung pada kesediaan masyarakat untuk mengubah perilaku dan membangun kebiasaan baru dalam mengelola sampah.

Meskipun memiliki tujuan yang baik, keberhasilan Program Menabung Sampah Menjadi Emas sangat ditentukan oleh efektivitas implementasinya. Dalam pelaksanaannya, program ini masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti belum meratanya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masih banyak warga yang belum memahami mekanisme menabung sampah menjadi tabungan emas maupun jenis sampah yang dapat disetorkan. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dari sumbernya juga masih relatif rendah, sehingga partisipasi masyarakat dalam program belum optimal. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti jumlah bank sampah yang masih terbatas, serta belum meratanya sumber daya manusia yang bertugas melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat turut menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Di samping itu, koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, PT Pegadaian, dan Bank Sampah Induk New Normal perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program Menabung Sampah Menjadi Emas tidak hanya bergantung pada konsep program yang inovatif, tetapi juga pada bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan di lapangan. Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan keputusan atau program yang telah dirumuskan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Edward III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana informasi mengenai program disampaikan kepada masyarakat dan pelaksana program. Sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas, dan dukungan pendanaan. Disposisi berkaitan dengan komitmen dan sikap para pelaksana dalam menjalankan program, sedangkan struktur birokrasi berhubungan dengan mekanisme kerja, pembagian tugas, dan koordinasi antarinstansi yang terlibat.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program pengelolaan sampah berbasis masyarakat mampu memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan ekonomi masyarakat. Penelitian Suryani (2014) menemukan bahwa bank sampah berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA. Penelitian Asteria dan Heruman (2016) juga menunjukkan bahwa keberhasilan bank sampah sangat dipengaruhi oleh sosialisasi yang berkelanjutan dan keterlibatan aktif masyarakat. Sementara itu, Rahmawati dan Chasanah (2021) menemukan bahwa program pengelolaan sampah berbasis insentif ekonomi dapat meningkatkan motivasi masyarakat dalam memilah sampah, meskipun masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran dan partisipasi sebagian masyarakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh konsep program yang baik, tetapi juga oleh bagaimana program tersebut diimplementasikan di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Menabung Sampah Menjadi Emas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan bekerja sama dengan PT

Pegadaian melalui Bank Sampah Induk New Normal di Kota Medan. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait implementasi program pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, serta menjadi bahan masukan bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Menabung Sampah Menjadi Emas di Kota Medan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kota Medan dengan fokus pada implementasi Program Menabung Sampah Menjadi Emas yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan bekerja sama dengan PT Pegadaian melalui Bank Sampah Induk New Normal. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, laporan, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan dengan penelitian. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yang melibatkan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, PT Pegadaian, Bank Sampah Induk New Normal, serta masyarakat yang terlibat dalam program. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis implementasi program dilakukan berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

HASIL DAN DISKUSI

Program Menabung Sampah Menjadi Emas

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, serta pembinaan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. DLH Kota Medan memiliki peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan lingkungan, termasuk pengembangan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, DLH Kota Medan tidak hanya berfokus pada pengelolaan sampah secara teknis, tetapi juga mendorong kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti sektor swasta, komunitas, dan masyarakat. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Program Menabung Sampah Menjadi Emas yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah sekaligus memberikan manfaat ekonomi melalui pemanfaatan sampah yang memiliki nilai jual.

Program Menabung Sampah Menjadi Emas merupakan inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mengintegrasikan aspek lingkungan dengan aspek ekonomi. Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilah dan menyetorkan sampah yang memiliki nilai ekonomis, seperti plastik, kertas, kardus, dan logam, ke bank sampah yang telah ditunjuk. Sampah yang terkumpul kemudian ditimbang dan dinilai berdasarkan harga pasar, lalu hasilnya dikonversikan menjadi saldo tabungan emas. Melalui program ini, masyarakat didorong untuk mengubah pola pikir bahwa sampah bukan hanya limbah yang harus dibuang, tetapi juga sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi. Selain berkontribusi dalam mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), program ini juga menjadi sarana edukasi untuk membangun budaya memilah sampah sejak dari rumah tangga.

Pelaksanaan Program Menabung Sampah Menjadi Emas melibatkan kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Bank Sampah Induk New Normal, dan Pegadaian sebagai mitra kolaborasi. Bank Sampah Induk New Normal berperan sebagai pengelola utama yang menerima, menimbang, mencatat, dan mengoordinasikan pengumpulan sampah dari masyarakat maupun unit-unit bank sampah yang berada di bawah binaannya. Sementara itu, Pegadaian berperan menyediakan layanan tabungan emas sebagai bentuk konversi nilai ekonomi sampah yang telah disetorkan masyarakat. Kolaborasi ketiga pihak tersebut menciptakan sinergi antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan. Melalui kerja sama ini, program tidak hanya berorientasi pada pengurangan sampah dan pelestarian lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sampah sebagai instrumen tabungan dan investasi sederhana.

Analisis Implementasi Program Menabung Sampah Menjadi Emas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dengan PT Pegadaian melalui Bank Sampah Induk New Normal di Kota Medan

Analisis implementasi program ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut menjadi alat analisis untuk melihat sejauh mana Program Menabung Sampah Menjadi Emas berhasil dijalankan dalam upaya mengurangi volume sampah sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat.

Komunikasi

Dalam teori Edward III, komunikasi merupakan faktor awal yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu program. Komunikasi berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat, baik pelaksana program maupun masyarakat sebagai kelompok sasaran, memahami tujuan, prosedur, manfaat, dan mekanisme program secara tepat. Komunikasi yang baik harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu transmission (penyampaian informasi), clarity (kejelasan pesan), dan consistency (konsistensi informasi).

Pada implementasi Program Menabung Sampah Menjadi Emas di Kota Medan, proses komunikasi dilakukan melalui kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat, edukasi mengenai pentingnya pemilahan sampah, serta koordinasi rutin antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Bank Sampah Induk New Normal, dan PT Pegadaian. Sosialisasi bertujuan memperkenalkan konsep bahwa sampah rumah tangga yang memiliki nilai ekonomis seperti plastik, kertas, kardus, dan logam dapat dikumpulkan dan ditukarkan menjadi saldo tabungan emas melalui sistem kerja sama dengan Pegadaian.

Berdasarkan hasil penelitian, aspek komunikasi dalam implementasi program ini masih menghadapi beberapa kendala. Dari indikator transmission, penyampaian informasi mengenai program belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Sosialisasi masih dilakukan pada wilayah atau kelompok tertentu sehingga masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya Program Menabung Sampah Menjadi Emas. Kondisi ini mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat belum optimal karena tidak semua warga memperoleh informasi mengenai keberadaan maupun mekanisme program.

Pada indikator clarity, informasi yang diterima masyarakat juga belum sepenuhnya jelas. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami jenis sampah yang dapat disetorkan, prosedur penyetoran sampah ke bank sampah, mekanisme konversi nilai sampah menjadi tabungan emas, serta syarat dan ketentuan dalam proses pencairan atau pemanfaatan tabungan emas tersebut. Kurangnya pemahaman ini menunjukkan bahwa materi sosialisasi belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat sebagai sasaran program.

Sementara itu, pada indikator consistency, penyampaian informasi belum dilakukan secara berkelanjutan. Sosialisasi masih bersifat insidental dan belum dilaksanakan secara rutin sehingga informasi yang diterima masyarakat tidak selalu diperbarui. Akibatnya, sebagian masyarakat kurang terdorong untuk terus berpartisipasi karena minimnya penguatan informasi dan pendampingan setelah sosialisasi awal dilakukan.

Berdasarkan ketiga indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek komunikasi dalam implementasi Program Menabung Sampah Menjadi Emas sudah berjalan, namun belum optimal. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Bank Sampah Induk New Normal, dan PT Pegadaian perlu meningkatkan intensitas sosialisasi melalui berbagai media, seperti media sosial, penyuluhan di tingkat lingkungan, kerja sama dengan sekolah maupun organisasi masyarakat, serta melakukan komunikasi secara berkelanjutan agar penyampaian informasi lebih merata, pesan yang diterima masyarakat lebih jelas, dan informasi yang diberikan tetap konsisten. Dengan demikian, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program diharapkan dapat terus meningkat.

Sumber Daya

Menurut Edward III, implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara efektif apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya tidak hanya mencakup jumlah dan kualitas

sumber daya manusia (staff), tetapi juga ketersediaan informasi (information), kewenangan (authority), serta fasilitas (facilities) yang mendukung pelaksanaan program.

Dalam implementasi Program Menabung Sampah Menjadi Emas di Kota Medan, aspek sumber daya telah didukung oleh keterlibatan beberapa pihak, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebagai pembina program, Bank Sampah Induk New Normal sebagai pengelola operasional, serta PT Pegadaian sebagai mitra yang menyediakan layanan tabungan emas. Masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Berdasarkan indikator staff, pelaksana program telah tersedia dan menjalankan tugas sesuai dengan perannya masing-masing. Namun, jumlah petugas yang melakukan pembinaan, pendampingan, dan sosialisasi kepada masyarakat masih terbatas dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kota Medan. Kondisi ini menyebabkan pembinaan kepada masyarakat belum dapat dilakukan secara merata sehingga masih terdapat masyarakat yang belum aktif berpartisipasi dalam program.

Pada indikator information, para pelaksana program telah memiliki pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan program. Akan tetapi, penyebaran informasi kepada masyarakat belum sepenuhnya optimal sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur penyetoran sampah, jenis sampah yang diterima, serta mekanisme konversi hasil penjualan sampah menjadi tabungan emas. Keterbatasan informasi tersebut berdampak pada rendahnya minat masyarakat untuk berpartisipasi.

Dari indikator authority, pembagian kewenangan antarinstansi telah berjalan dengan cukup baik. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan berperan sebagai pembina dan pengawas program, Bank Sampah Induk New Normal bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah dan administrasi tabungan, sedangkan PT Pegadaian mengelola sistem tabungan emas. Kejelasan pembagian kewenangan tersebut memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan program sehingga tidak ditemukan tumpang tindih tugas yang berarti.

Sementara itu, pada indikator facilities, program telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana berupa bank sampah, alat timbang, tempat penyimpanan sampah, sistem pencatatan administrasi, serta akses terhadap layanan tabungan emas Pegadaian. Meskipun demikian, jumlah bank sampah yang masih terbatas serta belum meratanya fasilitas di beberapa wilayah Kota Medan menyebabkan akses masyarakat untuk menyetorkan sampah belum sepenuhnya mudah. Kondisi ini turut memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program.

Berdasarkan keempat indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek sumber daya dalam implementasi Program Menabung Sampah Menjadi Emas secara umum sudah cukup memadai, terutama dari sisi kelembagaan, kewenangan, dan ketersediaan fasilitas dasar. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah petugas pendamping, belum meratanya penyebaran informasi, serta terbatasnya jangkauan fasilitas bank sampah. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat sebagai

pelaku utama dalam program juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian agar tujuan pengurangan sampah dan peningkatan nilai ekonomi masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Disposisi

Dalam teori Edward III, disposisi merupakan sikap, komitmen, dan kemauan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan suatu program. Disposisi yang baik ditunjukkan melalui adanya komitmen pelaksana dalam mencapai tujuan program, respons yang positif terhadap pelaksanaan kebijakan, serta adanya dukungan berupa insentif yang dapat mendorong keberhasilan implementasi.

Pada implementasi Program Menabung Sampah Menjadi Emas di Kota Medan, hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi para pelaksana program sudah tergolong baik. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Bank Sampah Induk New Normal, dan PT Pegadaian memiliki komitmen untuk menjalankan program sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Komitmen tersebut terlihat dari upaya yang dilakukan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, mengelola proses pengumpulan dan penimbangan sampah, serta memastikan mekanisme tabungan emas berjalan sesuai prosedur. Para pelaksana juga memiliki pemahaman bahwa program ini tidak hanya bertujuan mengurangi timbunan sampah, tetapi juga meningkatkan kesadaran lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Berdasarkan indikator komitmen (commitment), para pelaksana menunjukkan kesungguhan dalam mempertahankan keberlangsungan program melalui kerja sama yang terus dilakukan antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Bank Sampah Induk New Normal, dan PT Pegadaian. Meskipun demikian, komitmen tersebut masih menghadapi tantangan karena belum diimbangi dengan tingkat partisipasi masyarakat yang optimal.

Pada indikator respons pelaksana (response), para pelaksana memberikan respons yang positif terhadap pelaksanaan program dengan tetap melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, dari sisi masyarakat sebagai sasaran kebijakan, respons yang diberikan masih beragam. Sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran untuk memilah sampah dari rumah tangga dan masih menganggap sampah sebagai limbah yang tidak memiliki nilai ekonomi. Kondisi ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam program masih belum maksimal.

Sementara itu, pada indikator insentif (incentives), Program Menabung Sampah Menjadi Emas sebenarnya telah memberikan insentif ekonomi berupa tabungan emas hasil konversi nilai jual sampah. Akan tetapi, bagi sebagian masyarakat nilai ekonomi yang diperoleh masih dianggap relatif kecil dibandingkan dengan usaha yang harus dilakukan untuk memilah dan mengumpulkan sampah. Persepsi tersebut menyebabkan insentif yang diberikan belum mampu sepenuhnya meningkatkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi secara berkelanjutan.

Berdasarkan ketiga indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek disposisi dalam implementasi Program Menabung Sampah Menjadi Emas sudah berjalan dengan baik dari sisi para pelaksana program. Namun demikian, keberhasilan implementasi masih dipengaruhi oleh disposisi masyarakat sebagai kelompok sasaran yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan program. Oleh

karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam membangun kesadaran masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan serta penguatan manfaat ekonomi program agar masyarakat memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, struktur birokrasi merupakan sistem organisasi yang mengatur pembagian tugas, mekanisme kerja, prosedur operasional, serta koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Struktur birokrasi yang baik ditandai dengan adanya Standar Operasional Prosedur (Standard Operating Procedures/SOP) yang jelas serta pembagian tugas atau fragmentasi (fragmentation) yang terkoordinasi dengan baik sehingga setiap pelaksana memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing.

Dalam implementasi Program Menabung Sampah Menjadi Emas di Kota Medan, struktur birokrasi dibentuk melalui kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Bank Sampah Induk New Normal, dan PT Pegadaian. Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan program. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan bertanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan, serta mendorong partisipasi masyarakat. Bank Sampah Induk New Normal berperan sebagai pengelola operasional program, mulai dari penerimaan, penimbangan, pencatatan, hingga pengelolaan sampah yang disetorkan masyarakat. Sementara itu, PT Pegadaian bertugas mengonversi nilai ekonomi hasil penjualan sampah menjadi saldo tabungan emas milik nasabah.

Berdasarkan indikator Standar Operasional Prosedur (SOP), pelaksanaan program telah memiliki mekanisme kerja yang jelas, mulai dari proses pemilahan sampah, penyetoran ke bank sampah, penimbangan, pencatatan hasil penjualan, hingga konversi nilai sampah menjadi tabungan emas. Adanya prosedur tersebut memberikan pedoman bagi setiap pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap prosedur program. Sebagian masyarakat masih belum mengetahui tahapan penyetoran sampah maupun mekanisme tabungan emas sehingga pelaksanaan SOP di tingkat masyarakat belum berjalan secara optimal.

Pada indikator fragmentasi (fragmentation), pembagian tugas antarinstansi telah dilakukan secara jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Bank Sampah Induk New Normal, dan PT Pegadaian telah menjalankan fungsi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Meskipun demikian, koordinasi antarlembaga masih perlu diperkuat, khususnya dalam memperluas jangkauan program kepada masyarakat. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kelurahan, kecamatan, sekolah, komunitas lingkungan, dan organisasi masyarakat belum dilakukan secara maksimal sehingga masih terdapat wilayah yang belum aktif mengikuti program. Kondisi tersebut menyebabkan penyebaran informasi dan pembinaan kepada masyarakat belum merata.

Berdasarkan kedua indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi Program Menabung Sampah Menjadi Emas secara umum telah berjalan dengan baik

karena memiliki pembagian tugas yang jelas serta mekanisme kerja yang terstruktur. Namun, efektivitas implementasi masih memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prosedur program agar pelaksanaan kebijakan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan mencapai tujuan pengurangan sampah secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Menabung Sampah Menjadi Emas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan bekerja sama dengan PT Pegadaian melalui Bank Sampah Induk New Normal telah berjalan cukup baik berdasarkan empat indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada aspek komunikasi, sosialisasi dan penyampaian informasi telah dilaksanakan, namun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata sehingga masih terdapat masyarakat yang belum memahami mekanisme program. Pada aspek sumber daya, program telah didukung oleh sumber daya manusia, kewenangan, serta sarana dan prasarana yang memadai, meskipun masih terdapat keterbatasan jumlah petugas pendamping, penyebaran informasi, dan jangkauan bank sampah. Pada aspek disposisi, para pelaksana menunjukkan komitmen yang baik dalam menjalankan program, tetapi kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memilah serta menabung sampah masih relatif rendah. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, pembagian tugas dan mekanisme kerja antarinstansi telah berjalan dengan jelas, meskipun koordinasi dengan berbagai pihak di tingkat masyarakat masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi yang berkelanjutan, penguatan sumber daya dan koordinasi lintas sektor, serta upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar implementasi Program Menabung Sampah Menjadi Emas dapat berjalan lebih efektif dalam mengurangi timbulan sampah dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kota Medan.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, PT Pegadaian, dan Bank Sampah Induk New Normal meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan melalui berbagai media serta melibatkan pemerintah kelurahan, sekolah, komunitas, dan organisasi masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam Program Menabung Sampah Menjadi Emas. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sumber daya, baik dari segi pendampingan maupun perluasan jangkauan bank sampah, serta peningkatan koordinasi antarinstansi agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji efektivitas program dari perspektif perilaku masyarakat atau mengukur dampak program terhadap pengurangan timbulan sampah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih mendalam.

REFERENSI**Buku**

- Abdussamad Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar. Syakir Media Press.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2020). Collaborative Governance Regimes. Public Administration Review.
- Sugiyono. 2015. Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D). Bandung. Penerbit CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- Yudiyanto, Yudistira Era, dan Tania Atika. 2019. PENGELOLAAN SAMPAH (Pengabdian Pendampingan). Jakarta. Saiwawai Publishing

Jurnal/Skripsi

- Abdussamad, Tui, Mohamad, dan Dunggio Swastiani. 2022"Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango". Jurnal lingkungan hidup. 1(2):1-10.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory.
- Argenti Gili. 2017. Civil Society Dan Politik Moral Muhammadiyah. Jurnal Politikom Indonesiana. 2(2):82-104.
- Aunurohim, Wijayanti, dan Hermawan. 2019. Kolaborasi Institusi Pemerintah – Perguruan Tinggi – LSM dalam Pengelolaan Sampah Plastik Melalui Forum Group Discussion. Jurnal pengabdian kepada masyarakat 3(2):15-22.
- Fairuza Mia. 2020. Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata(Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi. Collaborations, Tourism, Inclusive Development, Stakeholders. 2(1):1-13.
- Hendrix dan Apriliyadi. 2021. Kajian Fenomena Pandemi Covid 19 di Indonesia: Prespektif wacana, pengetahuan dan kekuasaan Foucault. Jurnal Indonesia Maju. 1(1):28-48.
- Fitriyani Dwi, Jalmo tri dan Yolinda Berti. 2019. Penggunaan Problem Based Learning untuk Meningkatkan Keterampilan Kolaborasi Dan Berpikir Tingkat Tinggi. Jurnal Bioterdidik 7(3):77-87.
- Hayat, H., et al. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kolaborasi Lingkungan. Jurnal Administrasi Publik.
- Idris, Herdiana, dan Miftakhul. 2022.Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna". Jurnal kuliah umum dan terapan. 1(2):1-10.
- Kahfi Ashabul. 2017. TINJAUAN TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH. Jurnal Jurisprudentie. 4(1):12-25.
- Kirana Cintantya dan Artisa Rike. 2020. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative

- Governance di Kota Batu. *Jurnal Administrasi Publik*. 6(1):1-17.
- Kurniawan, T., Samudro, G., & Sembiring, E. (2022). Evaluasi Kapasitas SDM dan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah di Kota Metropolitan. *Jurnal Ilmu Lingkungan* (Universitas Diponegoro).
- Marlina Ani. 2020. Tata Kelola Sampah Rumah Tangga melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Indonesia. *Konsep dalam lingkungan pendidikan*. 11(2):1-20
- Nurufitri Herfrein. 2013. TATA KELOLA SAMPAH UNTUK MEWUJUDKAN KOTA BERSIH DI KECAMATAN PEMANGKAT. *Publika, Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNTAN*. 1(1):1-1
- Putri, P.A., Samudro, G., & Rahman, I. (2023). Tantangan Pengelolaan Sampah Domestik dan Peran Bank Sampah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*.
- Ronasifah, Ati, dan Hayat 2019. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakrawala Keadilan Dalam Pemberdayaan Lingkungan (Studi Tentang Gerakan Peduli Sampah Di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). *Kelembagaan Tata kelola sampah* 1(3):1-20.
- Saleh Choirul. 2018. Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi. *Modul Kuliah umum*. 1(1):1-62
- Saputro Endy. 2019. PERAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI) DALAM GERAKAN PENOLAKAN PENGUSURAN WADUK SEPAT DI KELURAHAN LIDAH KULON SURABAYA. *Jurnal ilmu sosial*. 1(2):1-25.
- Sembiring, E. (2021). Penguatan Peran Masyarakat dalam Tata Kelola Sampah di Kota. *Jurnal Ilmu Lingkungan*.
- Tamunu Lenny dan Sairani Laurensius. (2020). Kewargaan dan Kolaborasi Pemecahan Masalah Publik: Studi Isu Sampah Di Kota Kupang. *Timorese Journal of Public Health*. 2(1):1-13.

Undang-undang / Regulasi

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 20 Ayat (1) tentang Pengelolaan Sampah melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Permen LH) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan 3R (reduce, reuse dan recycle).

Website

- Badan Pusat Statiska. (2020). <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk--sp2020--pada-september-2020-mencatat-jumlah-penduduk-sebesar-270-20-juta-jiwa-.html>
- Menteri lingkungan hidup. (2022). <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
- Kompas id. (2023). <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/24/kota-medan-hasilkan-2000-ton-sampah-setiap-hari-sebagian-besar-belum-tertangani>
- Februari. (2022). <https://portal.pemkomedan.go.id/>
<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>